

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ashri, Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Social Politic Genius, Makassar, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Saf'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Budhi, Roebing Gunawan, *Revolusi Karyawan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, h. 147.
- *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip – Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hardjoprajitno (et al), *Hukum Ketenagakerjaan: Sejarah Hukum Ketenagakerjaan dan Ratifikasi Konvensi ILO*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Huda, Ni'Matul, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, 2005.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- International Labour Law Jakarta, *Manual Mediasi, Konsiliasi, Arbitrasi: Bahasa Indonesia and English*, Kantor Perburuhan Nasional, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Palguna, I Dewa Gede, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018.
- Pangaribuan, Juanda (*et al*), *Catatan Akademik Rancangan Undang Undang Pengadilan Hubungan Industrial*, Trade Union Right Centre, Jakarta, 2012.
- Ramli, Lanny, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta : Erlangga, 2010
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012 h. viii.
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Syamsuddin, Mohd. Syaufii, *Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2005.
- Uwiyono, Aloysius (*et al*), *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tambusai, Muzni, *Serial Pembinaan Hubungan Industrial, Seri 1: Kepastian Hukum; Seri 2: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, 2005.
- Zoelva, Hamdan, “Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia” dalam Hermasyah (*et al*), *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Astomo, Putra, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 64, 2014.

- Amalia, Apri, 'Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian', *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Chandra, Septa, 'Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia', *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Charda, Ujang S, 'Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Hukum Ketenagakerjaan setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004', *Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Dahlia dan Agatha Jumiati, 'Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2/2004', *Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Elviandri (*et al*), 'Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan', *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2019.
- Fendri, Azmi, 'Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral dan Etika', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.3, 2015.
- Ghansam Anand, 'Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak', *Yuridika*, Vol. 26, No. 2, 2011.
- Harahap, Yustika Tatar Fauzi dan Isis Ikhwansyah, 'Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materill dalam Proses Pembuktian Akta Otentik', *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Herdiana, Dadan, 'Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Hidayah, Khoirul, 'Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang', *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Hutchinson, Terry dan Nigel Duncan, 'Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research', *Deakin Law Review*, Vol. 17, No. 1.
- Indrayana, Denny dan Zainal Arifin Mochtar, 'Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2007.
- Iswahyuni, Ari, 'Kedudukan Ancaman Pidana Minimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat

- Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015', *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Khafie, Ashabul, 'Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja', *Jurisprudentie*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Khairunnisa, Shafira (*et al*), 'Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi-Konvensi *International Labour Law Organization* (ILO) di Indonesia', *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Kurniawan, 'Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas menurut Hukum Positif', *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2014.
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, 'Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Pidana Terpadu di Indonesia', *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Latipulhayat, Atip, 'Khazanah: Hans Kelsen', *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Manik, Rahmat GM, 'Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kesalahan Berat Setelah Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dicabut Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003', *Jurnal Melayunesia*, Vol 1, No 1, 2017.
- Mashari, 'Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Non-Litigasi Berbasis Keadilan Sosial', *Jurnal Masalah –Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 4, 2012.
- Meuraksa, M. Amin Elwalad, 'Analisis Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No. 129/Pdt.G/2016/Pn.Tng)', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Maulidi, Mohammad Agus, 'Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum', *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 4, 2017.
- Muhtadi, 'Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Mareta Josefhin, 'Penerapan *Restorative Justice* melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 2018.

- Nalle, Victor Imanuel W., 'Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan', *Refleksi Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- 'Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2009)', *Jurnal Yudisial*, Vol.6, No. 1, 2013.
- Nugroho, Bastianto, 'Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP', *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.
- Oeripkartawinata, Iskandar, 'Upaya-Upaya Hukum yang dapat Digunakan oleh Pencari Keadilan menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 11, No. 5, 1981.
- Pradima, Akbar, 'Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan', *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 17, 2013.
- Rosyid, Haryanto F., 'Pemutusan Hubungan Kerja: Masihkah Mencemaskan?', *Buletin Psikologi*, Vol. 9, No. 2, 2003.
- Santoso, Budi, 'Justifikasi Efisiensi sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja', *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, 2013, h. 406.
- Saputra, Rian, 'Pergeseran Prinsip Hakim Pasif ke Aktif pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif', *Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2019.
- Siahaan, Maruarar, 'Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, 2010.
- Sonhaji, 'Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja', *Administrative Law and Governance journal*, Vol. 2 No. 1, 2019, h. 61.
- Soeprapto, 'Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara', *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 10, No 2, 2005.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi. (et al), 'Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan', *Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2015.
- Sunarno, 'Beberapa Masalah pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Solusinya', *Wacana Hukum*, Vol. VIII, No. 2, 2009.

- Suprayogi, Agus, 'Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003', *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No.2, 2016.
- Suratno, Sadhu Bagas, 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik', *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2017.
- Taluke, Asdian, 'Eksekusi terhadap Perkara Perdata yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) atas Perintah Hakim dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri', *Lex Privatum*, Vol.I, No.4, 2013.
- Tamamudin, 'Pengaruh Strategi dan Teknologi Informasi Perusahaan terhadap Globalisasi', *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 124, No. 2, 2010.
- Tuker, Erick, 'Renorming Labour Law: Can We Escape Labour Law's Recurring Regulatory Dilemmas?', *Industrial Law Journal*, Vol. 39, No. 2, 2010.
- Tobing, Christina NM, 'Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial dalam Bingkai *Ius Constituendum* sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum dan Keadilan', *Jurnal Hukum dan Peradila*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Tryan, Muhammad Schinggyt P (*et.al*), 'Tinjauan Yuridis atas Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Wibowo, Mardian, 'Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Yetniwati (*et.al*), 'Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Industrial secara Mediasi', *Mika Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2009.
- Yuhdi, Mohammad, 'Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 1, 2013.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni dan Tanti Kirana Utami, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial', *Padjajaran Jurnal Ilmu Humum*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Geby Ali Yasa, *Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat yang Bukan Kualifikasi Tindak Pidana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003*, **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

Internet

Ady, 'Menakertrans: UU Ketenagakerjaan Layak Disempurnakan karena Ada Beberapa Pasal yang Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi', <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5f61becb947/menakertrans--uu-ketenagakerjaan-layak-disempurnakan/>, dikunjungi pada 14 November 2019.

Ali, 'Surat Edaran bukan Peraturan Perundang-Undangan', <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan-peraturan-perundangundangan/>, 16 Maret 2008, dikunjungi pada 20 November 2019.

Farianto, Willy dan Annisa Fathima, 'Akhir dari Problem Upah dan Penerapan PHK karena Kesalahan Berat Pasca Putusan MK', <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a01526da6ef7/akhir-dari-problem-upah-dan-penerapan-phk-karena-kesalahan-pasca-putusan-mk-oleh--willy-farianto-annisa-fathima-zahra/>, 7 November 2017, dikunjungi pada 20 November 2019.

Fariato, Farianto, 'Penerapan PHK karena Kesalahan Berat Pasca Putusan MK', <https://www.fardalaw.com/id/2019/01/14/penerapan-phk-karena-kesalahan-berat-pasca-putusan-mk/>, 14 Januari 2019, dikunjungi 15 November 2019.

Yasin, Muhammad, 'Kekuatan Hukum Prosdud-Produk Hukum MA (PERMA, SEMA, Fatwa, SK KMA)', <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>, 3 Mei 2013, dikunjungi pada 20 November 2019.